



Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris OPD Se-Kabupaten Wonogiri)

Ischak Riyadi^{1*}, Supartini², Syahriar Abdullah³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tunas
Pembangunan Surakarta, Jl. Walanda Maramis No. 31 Surakarta

*Penulis Korespondensi: ischakrdi@gmail.com

Abstract: *The research aims to examine and analyze the influence of the implementation of good governance, Competency of Financial Management Officials, Government Internal Control System and Use of Information Technology on the Quality of Regional Government Financial Reports in Wonogiri Regency. The method used in this research is a survey using a questionnaire measuring instrument. The population of this research is all financial management officials at the Wonogiri Regency Regional Apparatus Organization. This study uses saturation sampling. Based on this technique, a sample of 109 respondents was obtained. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using the IBM SPSS 27.0 software application. The results of this research partially show that the implementation of good governance (X₁), Competency of Financial Management Apparatus (X₂), Government Internal Control System (X₃) and Use of Information Technology (X₄) have a positive and significant effect on the quality of the Wonogiri Regency Regional Government's financial reports (Y). The results of this research simultaneously have these four variables also have a positive and significant effect on the quality of the Wonogiri Regency regional government's financial reports.*

Keywords: *Quality; good governance; competence; control; technology information.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *good governance*, Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pemanfaatan teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah di Kabupaten Wonogiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dengan menggunakan alat ukur kuesioner. Populasi penelitian ini adalah semua aparatur pengelola keuangan pada OPD Kabupaten Wonogiri. Teknik pengambilan sampel dengan sampling jenuh. Berdasarkan teknik tersebut, didapatkan sampel sebanyak 109 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS 27.0. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa penerapan *good governance* (X₁), Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan (X₂), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X₃) dan Pemanfaatan teknologi Informasi (X₄) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri (Y). Hasil penelitian ini secara simultan keempat variabel tersebut secara bersama-sama juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri.

Kata Kunci: *Kualitas, good governance; kompetensi; pengendalian; teknologi informasi.*

1. LATAR BELAKANG

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, setiap pemerintah daerah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara andal dan tepat waktu. Namun,

berdasarkan laporan BPK pada semester 1 tahun 2024 terdapat variasi yang signifikan dalam kualitas laporan keuangan daerah. Dari 546 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa, terdapat 493 pemda yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sementara 48 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan sisanya mendapatkan opini yang lebih rendah (IHPS 1, 2024). Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang baik.

Kualitas laporan keuangan tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan yang penting bagi pemangku kepentingan. Opini BPK dapat menjadi indikator yang berguna dalam menilai kualitas laporan keuangan pemerintah. Dalam sepuluh tahun terakhir, opini WTP terhadap LKPD di Jawa Tengah mengalami peningkatan, menunjukkan kemajuan dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, Kabupaten Wonogiri, meskipun mendapatkan opini WTP secara berturut-turut, masih memiliki catatan penting yang perlu diperbaiki, seperti masalah dalam pendapatan pajak dan belanja pemeliharaan (LHP BPK Jateng, 2024). Data dari BPK menunjukkan masih ada aspek yang memerlukan perhatian, seperti pendapatan pajak yang belum dipungut dan kelebihan pembayaran. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada kemajuan, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih dapat ditingkatkan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami determinan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut.

Salah satu faktor determinan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah penerapan good governance. Dengan penerapan good governance, pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas (Sita Ayu Ningrum dan Siti Sundari, 2022).

Determinan yang juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yaitu kompetensi aparatur pengelola keuangan. Aparatur pengelola keuangan yang memiliki pengetahuan tentang akuntansi pemerintahan, keuangan daerah dan penatausahaan keuangan yang baik sangat dibutuhkan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah

daerah. Aparatur yang kompeten akan menggunakan pengetahuannya untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, menggunakan keterampilannya untuk melakukan tugasnya dengan benar dan akurat, menghindari kesalahan dengan menerapkan prinsip akuntansi (Sita Ayu Ningrum dan Siti Sundari, 2022).

Faktor lain yang juga turut mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP Nomor 60 Tahun 2008). Semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula kualitas pelaporan keuangan daerah.

Dalam perkembangan era digital ini, pemanfaatan teknologi informasi telah meluas ke berbagai sektor, salah satunya dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran yang penting dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Teknologi informasi dapat membantu mengotomatisasi proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan sehingga mengurangi resiko kesalahan manusia. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah dapat disusun lebih cepat, lebih akurat dan lebih mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik serta dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah (Mirnawati, 2020).

Penelitian ini adalah pengujian kembali penelitian Sita Ayu Ningrum dan Siti Sundari (2022) dengan penambahan variabel pemanfaatan teknologi informasi dari penelitian Mirnawati (2020). Penelitian ini menggunakan sampel jenuh dari pengelola keuangan pada organisasi pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan Menurut IAI (2007) dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

B. Teori Stewardship

Dalam teori stewardship, para manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentanginya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai kepentingan pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Steward akan dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal (Eko Rahajo, 2007). Pemerintah memiliki tugas penting untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam lingkungan pemerintah, pengelola keuangan berperan dominan sebagai steward yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas ini.

C. Penerapan Good Governance

Menurut bank dunia good governance diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, predictable, terbuka, dan dalam proses pengambilan kebijaksanaan bebas dari kecurigaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Junaedi Karso, 2022). Konsep tersebut meliputi pembangunan yang bertanggung jawab, penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam proses demokratisasi, serta upaya

menghindari kesalahan. Tindakan ini merupakan implementasi nyata dari prinsip-prinsip good governance yang berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H1 : Penerapan good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan

Aparatur pengelola keuangan merupakan bagian Aparatur Sipil Negara yang bertugas di daerah provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan surat penugasannya. Dalam konteks ini, aparatur daerah merupakan sumber daya manusia menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan organisasi dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang memungkinkan mereka untuk berkinerja lebih baik daripada orang lain di tempat kerja. Standar atau kriteria yang diterapkan dapat digunakan untuk memprediksi kualitas seseorang. Laporan keuangan dapat dihasilkan dengan baik dan tepat waktu oleh aparatur sipil daerah jika kompeten dalam menyiapkan informasi keuangan sebagai dasar laporan tersebut.

H2 : Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

E. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern memegang peranan kunci dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan. PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

H3 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

F. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi yang di dalamnya meliputi pengolahan data, informasi, sistem manajemen serta proses kerja secara elektronik dan juga pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan. Penggunaan komputer, software ataupun perangkat lunak lainnya yang sejenis secara optimal merupakan pemanfaatan teknologi informasi.

H4 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah..

3. METODE PENELITIAN

Studi ini dilaksanakan pada OPD pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri sejumlah 53 OPD. Populasi studi ini berjumlah 187 pegawai yang berhubungan langsung dengan penyusunan laporan keuangan terdiri dari kasubag keuangan, bendahara pengeluaran dan operator aplikasi keuangan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sensus atau sampling jenuh. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner penelitian yang disebar secara daring melalui google form dengan memanfaatkan media sosial WhatsApp. Pengisian kuesioner dilakukan secara digital dan dikirim kembali secara daring melalui google form. Studi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan sumber data primer dari kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan pengujian validitas, reliabilitas dan uji normalitas terlebih dahulu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kuesioner yang disebar 187 buah melalui *google form* diperoleh jawaban terkumpul sebanyak 109 responden. Data tersebut terdiri dari 47 laki-laki (43,1%) dan 62 perempuan (56,9 %). Berdasarkan usia responden, usia 20-30 tahun sejumlah 71 orang (65,1%), usia 31-40 tahun berjumlah 10 orang (9,2%) dan usia lebih 40 tahun berjumlah 28 orang (25,7%). Berdasarkan tingkat Pendidikan, responden dengan Pascasarjana (S2) sebanyak 23 orang atau 21,1% , pendidikan sarjana (S1) sebanyak 49 orang (45%), pendidikan Diploma 3 17 orang (15,6%) sedangkan

pendidikan SMA 20 orang (18,3%). Berdasarkan masa kerja, pegawai yang bekerja 1 s/d 5 tahun berjumlah 14 orang (12,8%), bekerja 6-10 tahun 14 orang (12,8%) dan yang bekerja diatas 10 tahun 81 orang (74,3%).

Hasil uji validitas didapatkan nilai r hitung terendah yaitu 0,404. Hasil r hitung tersebut lebih besar dari r tabel pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=0,05$) dengan derajat kebebasan (df)= $109-2=107$ yaitu sebesar 0,188 (uji dua arah). Sesuai kriteria r hitung lebih besar dari r tabel maka butir seluruh pernyataan tersebut valid. Hasil pengujian reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Penerapan Good Governance	0,900
Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan	0,887
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,897
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,898
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,697

Berdasarkan kriteria reliabilitas Cronbach Alpha $> 0,60$, dengan demikian dapat dinyatakan masing-masing kuesioner tersebut reliabel. Sedangkan hasil pengujian normalitas dengan Kolmogorof-Smirnov didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,093. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa data yang diujikan dinyatakan berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas dengan aplikasi SPSS Versi 27 didapatkan nilai sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independ	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Penerapan Good Governance	0,364	2,744
Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan	0,341	2,933
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,296	3,378
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,353	2,833

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemda

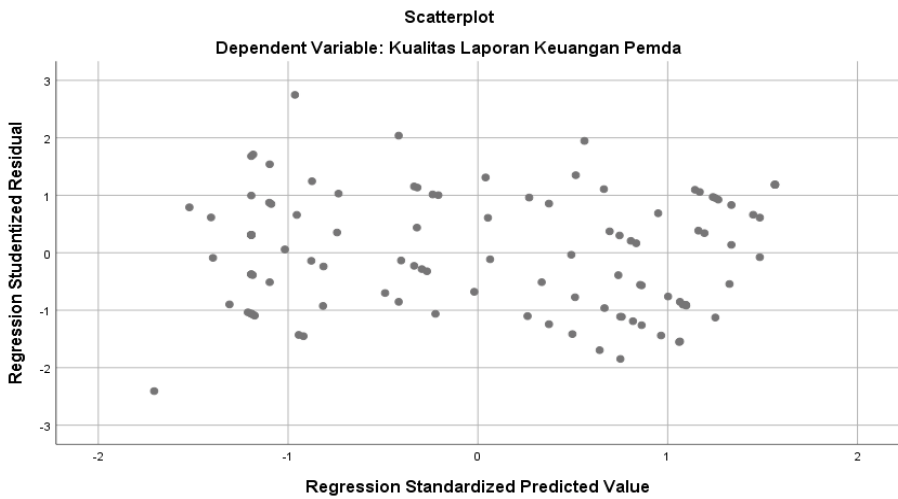
Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 2 dapat dinyatakan masing-masing variable memiliki nilai lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hal ini mengindikasikan variabel dalam

penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas, sehingga memenuhi syarat untuk digunakan sebagai model regresi linear berganda.

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan model diagram Scatterplot. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan scatter plot dapat dilihat pada gambar bawah ini :

Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatter Plot



Sumber : *Data primer yang diolah, 2025*

Sesuai dengan gambar 1 diagram scatterplot dapat diketahui bahwa data menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

A. Uji hipotesis

Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis

	t	Sig t
(Constant)	8,329	,000
Penerapan Good Governance	2,033	,045
Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan	2,505	,014
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2,289	,024
Pemanfaatan Teknologi Informasi	2,698	,008
F	53,366	
Sig. F	0,000	
Adjusted R Square	0,660	

Sumber : *Data primer yang diolah, 2025*

Dari tabel di atas menunjukkan koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,660. Hal ini menjelaskan bahwa 66% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi variabel oleh penerapan penerapan good governance, kompetensi aparatur pengelola keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi, sisanya sebesar 34% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Nilai signifikansi (p-value) sebesar $0,000 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan good governance, kompetensi aparatur pengelola keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah penerapan good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil uji regresi menunjukkan angka sebesar 0,189 yang artinya semakin baik penerapan good governance semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian nilai $t_{tabel} (2,033) > t_{hitung} (1,983)$ dan signifikansi $0,045 < 0,05$ berarti hipotesis yang diajukan (H1) diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan good governance dapat mempengaruhi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wonogiri.

Penerapan good governance di Kabupaten Wonogiri dapat dilihat dari berbagai penghargaan yang diterima dari pemerintah pusat terkait penerapan pemerintahan yang baik, diantaranya penghargaan peringkat kedua evaluasi kinerja (EPPD) Kabupaten Wonogiri tahun 2024, kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik 2024 dan penghargaan Inovation Government Award (IGA) 2023. Dalam konteks penerapan good governance, pengelolaan keuangan di Kabupaten Wonogiri juga sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai pedoman untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diantaranya keterbukaan akses LKPD Kabupaten Wonogiri. Dengan demikian, penerapan good governance di Kabupaten Wonogiri juga berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

C. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah kompetensi aparatur pengelola keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sesuai uji regresi menunjukkan angka sebesar 0,241 yang artinya semakin kompeten aparatur pengelola keuangan semakin meningkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian nilai $t_{tabel} (2,505) > t_{hitung} (1,983)$ dan signifikansi $0,14 < 0,05$ berarti hipotesis yang diajukan (H_2) diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin kompeten aparatur pengelola keuangan dapat berpengaruh pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wonogiri.

Dalam penelitian ini, aparatur pengelola keuangan di Kabupaten Wonogiri terbukti memiliki kompetensi yang baik dalam menyusun laporan keuangan. Kompetensi aparatur pengelola keuangan di kabupaten wonogiri sangat baik, di dukung oleh Peraturan Bupati Wonogiri nomor 86 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan. Selain itu dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan aparatur pengelola keuangan juga didukung aplikasi SIPKD yang mempermudah, mempercepat dan mengurangi kesalahan pencatatan mulai dari penyusunan anggaran, penatausahaan sampai pelaporan dan penyusunan laporan keuangan, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi sangat baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sita Ayu Ningrum dan Siti Sundari (2022) dan penelitian Bestari dan Wahyuni (2023) yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur pengelola keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri.

D. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah. Berdasarkan uji regresi menunjukkan angka sebesar 0,236 yang artinya semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian nilai $t_{tabel} (2,289) > t_{hitung} (1,983)$ dan tingkat signifikansi $0,024 < 0,05$ berarti hipotesis yang diajukan (H_3) diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah, semakin besar pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wonogiri.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berfungsi dengan baik, antara lain melalui otorisasi berjenjang terhadap pengeluaran belanja pemerintah, tersedianya DPA sebagai acuan setiap pelaksanaan belanja dan pemeriksaan berkala oleh auditor inspektorat. Dengan sistem pengendalian intern yang berjalan baik, kesalahan dalam pencatatan, pembukuan dan pelaporan dapat diminimalkan sehingga pada akhirnya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini didukung penelitian Bestari dan Wahyuni (2023) yang membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Tegal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri.

E. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sesuai uji regresi menunjukkan angka sebesar 0,255 yang artinya semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian nilai $t_{tabel} (2,698) > t_{hitung} (1,983)$ dan tingkat signifikansi $0,008 < 0,05$ berarti hipotesis yang diajukan (H_4) diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi dapat berpengaruh pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wonogiri.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan bukti pemanfaatan teknologi oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Dengan pemanfaatan aplikasi SIPKD pada tahun 2015, pemerintah Kabupaten Wonogiri berhasil mendapatkan opini WTP dari BPK pertama kalinya, setelah sebelumnya hanya mendapatkan opini WDP. Hal ini membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Mirnawati, et al (2021) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Hasil ini didukung penelitian Tyas Kurnia Sari (2022) yang menunjukkan sistem akuntansi dan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan juga didukung penelitian Bestari dan Wahyuni (2023) yang menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wonogiri dapat disimpulkan bahwa penerapan good governance, kompetensi aparatur pengelola keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil sinergi dari penerapan good governance yang baik, aparatur pengelola keuangan yang kompeten, sistem pengendalian internal yang memadai, serta pemanfaatan teknologi informasi yang optimal.

Penerapan good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wonogiri. Penerapan good governance yang baik tercermin dari berbagai penghargaan dan penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi aparatur pengelola keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wonogiri. Semakin kompeten aparatur yang mengelola keuangan maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wonogiri. SPIP yang berjalan efektif, seperti otorisasi berjenjang dan pemeriksaan berkala, mampu meminimalkan kesalahan pencatatan serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wonogiri. Pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Wonogiri terlihat dalam penggunaan aplikasi SIPKD yang berjalan secara online.

Saran untuk pemerintah Kabupaten Wonogiri, Inspektorat sebagai aparat pengawas internal diharapkan meningkatkan intensitas audit internal berbasis risiko, terutama pada sektor penerimaan daerah dan belanja pemeliharaan. Audit internal yang lebih proaktif akan membantu mencegah terjadinya temuan berulang serta meningkatkan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan. Setiap OPD perlu meningkatkan efektivitas pengendalian intern, khususnya pada area yang masih ditemukan kelemahan seperti pemungutan PBJT serta pengendalian belanja pemeliharaan. Langkah ini dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan internal, penerapan mekanisme verifikasi yang lebih ketat terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran. Saran untuk penelitian yang selanjutnya disarankan untuk menambahkan metode wawancara dalam pengambilan data untuk mengurangi bias dalam pengisian kuesioner. Untuk penelitian dengan topik yang sama disarankan untuk menambahkan variabel lain untuk lebih memperluas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner melalui google form, sehingga kualitas data sangat bergantung pada keseriusan serta pemahaman responden dalam mengisi setiap pertanyaan. Selain itu, jumlah responden yang menjawab juga dipengaruhi oleh kesediaan individu untuk berpartisipasi karena kemungkinan ada rasa enggan dan malas untuk menjawab kuesioner.

DAFTAR REFERENSI

- Apriada, K., & Wulandari, Putu R. (2022). Determinan Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Ubud. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 705-717. <https://doi.org/10.23887/jimat.v13i02.49763>
- Bestari, K. A. & Wahyuni, F. (2023). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 163-184. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i1.16995>
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2025). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024. <https://www.bpk.go.id/ihps>
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafsari, P. (2020). *Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Haq, Rima Angelia & Akbar, Fajar Syaiful. (2022). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6 (3), 789-803. DOI: <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2398>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Imelia, D., Sri Rahayu, Wiralestari (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kerinci. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 6(3), 149-163. <https://doi.org/10.22437/jaku.v6i3.16112>
- Indaryani, D.I., & Wdiastuti, H (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumberdaya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/rab.040148>
- Karso, A.J (2022). *Buku Ajar Good Governance*. Yogyakarta: Samudra Biru
- Koto, Annisa Nur S (2019). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern*

Sebagai Variabel *Intervening* (*Studi Empiris pada SKPD Kota Tangerang Selatan*).
Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta.

- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Keempat (Cetakan Pertama). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nailufa, Diva H. (2024). Analisis Determinan Dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang). Universitas Islam Sultan Agung.
- Ningrum, S.A., & Sundari, S. (2022). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5(1) 317-322 <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1980>
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Permendagri nomor 11 tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.
- Rahajo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. Fokus Ekonomi: *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2 (1), 37-46. <https://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe/article/view/22>
- Rahma, Adhisa N. (2023). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Kota Magelang). Universitas Tidar.
- Rohayatin, Titin. (2023). Teori Pemerintahan. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Sari, F. M. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Batang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, 3(1), 27-42. <https://doi.org/10.56696/jaka.v3i1.6648>
- Sari, G. I., dan Fadli, F. (2019). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 7(3), 17-34. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.3.17-34>

Sari, Tyas K. (2022). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Islam Sultan Agung.

Sholohah, S. A., Sulistyawati, A. I., & Santoso, A. (2019). Kualitas Laporan Keuangan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Indonesia Accounting Jurnal*, 1(2), 45-56. **DOI:** <https://doi.org/10.32400/iaj.26622>

Silalahi, A P. B., Nurahma T. (2020). Pengaruh Kinerja Teknologi Informasi dan Inovasi Teknologi Terhadap Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan (Studi Kasus PT. Total Bangun Persada, Tbk). *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan* 5(2): 195-200. DOI:[10.24912/jmbk.v5i2.11231](https://doi.org/10.24912/jmbk.v5i2.11231)

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tampubolon, Fitri., & Basid, Ahmad. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi DKI Jakarta). *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 3(1), 55-65. **DOI:** <https://doi.org/10.23969/oikos.v3i1.1415>

Tyas, Vika E., A., Tyasari, Irma & Yogivara, Doni. W. (2020). Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 8(1). **DOI:** <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4458>.

Undang Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.